KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BUKU 7
PROJECT OPERATION MANUAL

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

SEKRETARIAT CPMU SIMURP

JUNI 2020

KATA PENGANTAR

Project Operational Manual (POM) *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) merupakan panduan pelaksanaan proyek SIMURP yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang ditandatangani bulan Juli 2018.

POM disusun sebagai acuan kerja bagi para pelaksana dan pengawas proyek SIMURP untuk memastikan tujuan proyek dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu.

Buku POM SIMURP terdiri atas 7 (tujuh) buku terdiri dari:

a. Buku 1: Program dan Pelaksanaan Kegiatan SIMURP
b. Buku 2: Indikator Target Proyek (*Project Development Objective*)
c. Buku 3: Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)
d. Buku 4: Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*)
e. Buku 5: Pengelolaan Keuangan (*Financial Management*)
f. Buku 6: Pertanian Cerdas Iklim (*Climate Smart Agriculture*)
g. Buku 7: Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Seluruh buku yang ada dalam POM ini diharapkan bermanfaat dan membantu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek SIMURP.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Selaku Ketua *Central Project Management Unit* (CPMU) SIMURP

Ir. Jarot Widyoko, Sp.1.
NIP. 19630224 198810 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR SINGKATAN iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Pengaturan Kelembagaan SIMURP 3
1.4. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi 5

BAB II KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA 11
2.1. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi 11
2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 22
2.2.1. Komponen A: Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak 23
2.2.2. Komponen B: Modernisasi Sistim Irigasi dan Drainase Strategis 29

BAB III INDIKATOR TARGET PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 39
3.1. Manfaat Proyek 39
3.2. Indikator Utama Proyek 39
3.3. Indikator Hasil Pendukung Berdasarkan Komponen 40
3.3.1 Komponen A: Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak 40
3.3.2 Komponen B: Modernisasi Sistim Irigasi dan Drainase Strategis 41

BAB IV RENCANA ANGGARAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BERDASARKAN KOMPONEN KEGIATAN 43
4.1. Anggaran Kegiatan Komponen A: Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak 44
4.2. Anggaran Kegiatan Komponen B: Modernisasi Sistim Irigasi dan Drainase Strategis .. 44

DAFTAR SINGKATAN

AKNPI	Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi
AKNOP	Angka Kebutuhan Nyata Operasi Pemeliharaan
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	*Adjustable Programme Loan*
ASIM	*Agriculture Support Irrigation Management*
AWP	*Annual Work Plan*
BAP	Berita Acara Pembayaran
BAPP	Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
Balai PSDA	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELUH	Badan Pelaksana Penyuluhan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BH	Badan Hukum
BJP	Biaya Jasa Pengelolaan
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BLU	Badan Layanan Umum
BKU	Buku Kas Umum
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BPPSDMP	Badan Pengembangan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian
BWRM	*Basin Water Resources Management*
BWRMP	*Basin Water Resources Management Planning*
BWS	Balai Wilayah Sungai
CDD	*Community Driven Development*
CPIU	*Central Project Implementation Unit*
CPMU	*Central Project Management Unit*
CQS	*Consultants Qualification Selection*
DC	*Direct Contracting*

DI	Daerah Irigasi
DIA	Dana Investasi Agribisnis
Dinas PU	Dinas Pekerjaan Umum
DJPB	Ditjen Perbendaharaan
DJPK	Ditjen Perimbangan Keuangan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPI	Dana Pengelolaan Irigasi
DSA	Dewan Sumberdaya Air
EA	*Executing Agency*
EIA	*Environmental Impact Assessment*
ESMF	*Environmental and Social Management Framework*
EMP	*Enviromental Management Plan*
EoI	*Expression of Interest*
FA	*Force Account*
FMR	*Financial Monitoring Report*
FS	*Financial Statement*
FY	*Fiscal Year*
GAPOKTAN	Gabungan Kelompok Tani
GIS	*Geographic Information System*
GoI	*Government of Indonesia*
GU	Ganti Uang
GP3A/IP3A	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/ Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air
HPS	*Harga Perhitungan Sendiri*
IAIP	*Irrigated Agriculture Improvement Programme*
IBRD	*International Bank for Reconstruction and Development*
IC	*Individual Consultant*
ICB	*International Competitive Bidding*
IFR	*Interim Financial Report*
IDA	*International Development Assistance*
IDPIM	*Institutional Development in Participatory Irrigation Management*
IOC	*Incremental Operational Cost*
IoPIM	*Improvement of Participatory Irrigation Management*

IP	Intensitas Pertanaman
IPP	*Indigenous People Plan*
IWRM	*Integrated Water Resources Management*
JIMI	Jatiluhur Irrigation Management Improvement
JIWMP	*Java Irrigation Improvement and Water Management Project*
KOMIR	Komisi Irigasi
KPI	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi
KPL	Kelompok Pemandu Lapangan
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
K/L/D/I	Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi
KSO	Kerja Sama Operasional
LARAP	*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*
LCB	*Local Competitive Bidding*
LC	*Latter of Credit*
LCS	*Least Cost Selection*
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
M&E	*Monitoring and Evaluation*
MIS	*Management Information System*
MoU	*Memorandum of Understanding*
NCB	*National Competitive Bidding*
NGO	*Non Governmental Organization*
NOL	*No Objection Letter*
NPIU	*National Project Implementation Unit*
NSCWR	*National Steering Committee on Water Resources*
O&M	*Operation and Maintenance*
OJT	*On the Job Training*
PA-BAPP	Pengguna Anggaran–Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
PAD	*Project Appraisal Document*
PAI	Pengelolaan Aset Irigasi
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDO	*Project Development Objective*
PERDA	Peraturan Daerah
PIM	*Participatory Irrigation Management*

PIP	*Project Implementation Plan*
PISP	*Participatory Irrigation Sector Project*
PIU	*Project Implementation Unit*
PJT-I/II	Perum Jasa Tirta I/II
PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
PJPA	Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
PJSA	Pemanfaatan Jaringan Sumber Air
PJSDA	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
PM&E	*Program Monitoring & Evaluasi*
PMIS	*Project Management Information System*
PMM	*Project Management Manual*
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMS	*Procurement Management System*
PMU	*Project Management Unit*
POKTAN	Kelompok Tani
POM	*Project Operation Manual*
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PPSIP	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
PPTK	Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPh	Pajak Penghasilan
PL/DP	Pembayaran Langsung/*Direct Payment*
PRA	*Participatory Rural Appraisal*
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Air
PSETK	Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puslitbang SDA	Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA
QA	*Quality Assurance*
QBS	*Quality Based Selection*
QCBS	*Quality and Cost Based Selection*
QER	*Quality Enhancement Review*
RAP	*Resettlement Action Plan*

REA	*Rapid Environment Assessment*
RFP	*Request For Proposal*
RKA-K/L	Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga
RIM	*River Infrastructure Maintenance*
RP2I	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
RMF	*Result of Monitoring Framework*
SDA	Sumber Daya Air
SBD	*Standard Bidding Document*
SIMURP	*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project*
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPM	Surat Perintah Membayar
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPP-SKP	Surat Permintaan Penerbitan-Surat Kuasa Pembebanan
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan
SISDA	Sistim Informasi Sumber Daya Air
SK	Surat Keputusan
SP3	Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan
SSS	*Single Source Selection*
SUPD I/II	Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I/II
TKPSDA	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
TNA	*Training Needs Assessment*
ToR	*Terms of Reference*
TPM	Tenaga Pendamping Masyarakat
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UP	Uang Persediaan
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
ULP	Unit Layanan Pengadaan
UNDB	*United Nations Development Business*
WB	*The World Bank*
WS	Wilayah Sungai
WUR	*Water Use Right*

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Indikator Utama Proyek SIMURP 38
Tabel 3.2. Indikator Pendukung Komponen A Proyek SIMURP 39
Tabel 3.3. Indikator Pendukung Komponen B Proyek SIMURP 40
Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Kegiatan SIMURP Berdasarkan Komponen Kegiatan 41
Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Kegiatan SIMURP Berdasarkan Institusi 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengaturan Struktur Kelembagaan SIMURP 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi yang prima merupakan salah satu syarat utama dalam meningkatkan produkivitas pertanian beririgasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan strategis dengan mendorong pembaharuan pengelolaan irigasi menuju sistem yang lebih modern dengan kegiatan modernisasi irigasi baik secara teknis, manajerial, maupun kelembagaan (termasuk aspek sumber daya manusianya).

Sistim pengelolaan irigasi ke depan selain didasarkan pada pendekatan partisipatif juga berorientasi pada peningkatan layanan irigasi (*level of irrigation services*) atas dasar sistem pengelolaan irigasi secara utuh, efektif, efisien, dan berkelanjutan yang dilakukan melalui upaya modernisasi irigasi. Modernisasi irigasi telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, antara lain yaitu:

> "Dalam rangka pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dapat dilakukan modernisasi irigasi dengan peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, manajemen irigasi, lembaga pengelola, dan sumber daya manusia".

Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi di Indonesia dalam rangka modernisasi irigasi dilakukan dengan pendekatan 5 (pilar) modernisai irigasi sesuai Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/D/2018 tentang Pedoman Teknis Modernisasi Irigasi, yaitu: (1) Ketersediaan air; (2) Infrastruktur Irigasi; (3) Pengelolaan Irigasi; (4) Institusi Irigasi; dan (5) Manusia Pelaku dalam Pengelolaan Irigasi. Kegiatan modernisasi tersebut dalam konteks persiapan mulai diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui kegiatan *Strategic Irrigation Modernization*

and Urban Rehabilitation Project (SIMURP) yang sudah disepakti melalui *Loan of Agreement* dari Bank Dunia (IBRD 8891-ID) dan AIIB (Loan No. L0060A).

Unsur penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaksanaan pilar modernisasi irigasi menjadi bagian dari subkomponen kegiatan yang dikembangkan baik pada sistim irigasi pemerintah di atas 3.000 ha (komponen A) maupun sistim irigasi strategis Jatiluhur (komponen B). Kelembagaan pengelolaan irigasi yang terdiri dari unsur institusi pemerintah, institusi petani pemakai air, dan institusi koordinasi (Komisi Irigasi) perlu membangun sistem pengaturan kelembagaan yang mampu mengatasi permasalahan pengelolaan dan pelayanan irigasi. Kelembagaan tersebut tentunya harus kuat dan didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang handal sesuai dengan karakteristik lokal berdasarkan sistem manajemen imbalan (*provision*) yang tepat.

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa meskipun institusi pemerintah bertanggung jawab di tingkat sistem jaringan utama dan petani di jaringan tersier tetapi institusi pemerintah juga berkewajiban untuk melayani petani sesuai dengan tujuan manajemen yang disepakati bersama. Pengembangan institusi ini juga akan memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan internet sehingga membentuk dan meningkatkan pengetahuan para pelaku dalam pengelolaan irigasi. Melalui kegiatan SIMURP, penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dikembangkan menjadi bagian dari subkomponen strategis baik untuk komponen A maupun komponen B. Buku ketujuh (Buku-7) ini merupakan bagian dari keseluruhan buku pedoman pelaksanaan proyek atau *Project Operational Manual* (POM) kegiatan SIMURP yang disusun untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, capaian target, kebutuhan dukungan bantuan teknis konsultan, dan kebutuhan anggaran yang dialokasikan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan buku 7 (penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia) kegiatan SIMURP ini adalah untuk memberikan acuan kepada pelaksana kegiatan pada setiap NPIU dan PIU dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan tujuannya adalah:

(1) Meningkatkan pemahaman pelaksana kegiatan tentang jenis kegiatan dan alokasi anggaran penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap komponen A maupun komponen B SIMURP;
(2) Meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan secara trampil untuk melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap komponen A maupun komponen B SIMURP;
(3) Mewujudkan capaian target kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap komponen A maupun komponen B SIMURP; dan
(4) Meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan untuk menyusun proses pelaporan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada setiap komponen A maupun komponen B SIMURP dengan baik.

1.3. Pengaturan Kelembagaan SIMURP

Kementerian yang mengelola kegiatan SIMURP (*executing agency*) adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air), dan kementerian yang bertindak selaku pengarah kegiatan SIMURP (*National Steering Committee of Water Resources)* adalah Kementerian PPN/Bappenas (selanjutnya disebut NSCWR Bappenas). Pembentukan NSCWR dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat maupun di daerah yang menggunakan berbagai sumber pendanaan termasuk kerjasama luar negeri di bidang sumber daya air. NSCWR Bappenas antara lain bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan SIMURP dibentuk Unit Manajemen Proyek Pusat atau *Central Project Management Unit* (CPMU) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dimana sekretariat CPMU berada pada Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air (selanjutnya disebut CPMU SIMURP). Keanggotaan CPMU SIMURP terdiri dari beberapa unsur perwakilan kementerian dan

Lembaga, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan. Dukungan konsep dan fasilitasi kegiatan CPMU akan dilaksanakan oleh konsultan pengelolaan proyek (*Project Management Consultant*, selanjutnya disebut PMC-SIMURP) dalam meningkatkan kinerja pengelolaan proyek SIMURP.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan SIMURP dilakukan oleh beberapa kelembagaan kementerian sebagai pelaksana kegiatan di tingkat pusat, yaitu sebagai berikut:

1. *Central Project Implementing Unit* (CPIU) Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Kementerian PUPR (selanjutnya disebut CPIU Irwa);
2. *National Project Implementing Unit* (NPIU) Direktorat Operasi dan Pemeliharaan dan Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen SDA Kementerian PUPR (selanjutnya disebut NPIU OP-PSDA);
3. NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah (SUPD I dan SUPD II) Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut NPIU Bangda);
4. NPIU Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian (selanjutnya disebut NPIU Pertanian); dan
5. *Project Implementing Unit* (PIU) Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (selanjutnya disebut PIU B/BWS) pada wilayah kegiatan SIMURP, yaitu:
   (1) BBWS Sumatera VIII (di Palembang Provinsi Sumatera Selatan);
   (2) BBWS Citarum (di Bandung Provinsi Jawa Barat);
   (3) BBWS Cimanuk Cisanggarung (di Cirebon Provinsi Jawa Barat);
   (4) BBWS Serayu Opak (di Yogyakarta);
   (5) BBWS Brantas (di Surabaya Provinsi Jawa Timur);
   (6) BBWS Pompengan Jeneberang (di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan);
   (7) BWS Sumatera II (di Medan Provinsi Sumatera Utara);
   (8) BWS Nusa Tenggara I (di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat); dan
   (9) BWS Kalimantan II (di Palangkaraya Povinsi Kalimantan Tengah).

Struktur pengaturan kelembagaan SIMURP lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.

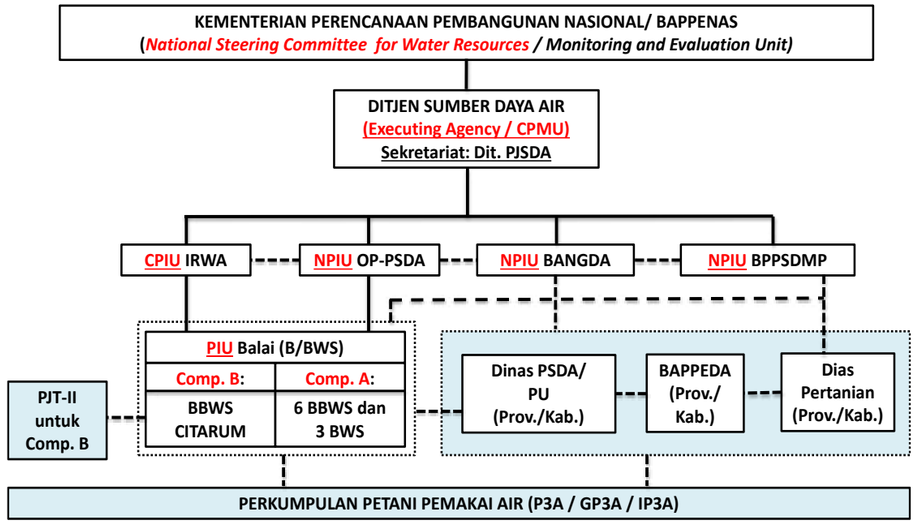

Gambar 1. 1 Pengaturan Struktur Kelembagaan SIMURP

1.4. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Kelembagaan pengelolaan irigasi dibentuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kelembagaan pengelolaan irigasi adalah kelembagan yang dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi (, Dinas PU Pengairan/Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Balai Besar / Balai Wilayah Sungai), perkumpulan petani pemakai air (P3A, GP3A, IP3A) atau dengan nama lain (HIPPA, GHIPPA, IHIPPA), dan komisi irigasi.

Perkembangan kelembagaan pengelolaan irigasi telah banyak mewarnai pergeseran sistem irigasi dan sistem kelembagaan itu sendiri yang mencakup artefak sosial ekonomi masyarakat yang terus berlangsung dalam kehidupan petani pemakai air di Indonesia. Fungsionalisasi dan kemanfaatan infrastruktur jaringan irigasi yang handal tentunya membutuhkan kelembagaan pengelolaan irigasi yang kuat. Sistem kelembagaan pada akhirnya akan mempengaruhi sistem irigasi baik pada aspek pengaturan kebijakan, pengaturan kelembagaan, maupun pengaturan operasionalisasinya.

Bentuk kelembagaan irigasi akan berdampak pada kinerja produksi, penggunaan input, kesempatan kerja, perolehan hasil, dan kelestarian lingkungan. Rekayasa kelembagaan irigasi yang diadopsi oleh masyarakat petani pemakai air sangat tergantung

pada struktur, wewenang, kepentingan individu, kondisi petani pemakai air itu sendiri, serta adat kebiasaan dan budaya yang tumbuh dalam kehidupan sosialnya. Gambaran ini memberikan pembelajaran bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi yang mempunyai nilai-nilai dan norma yang dapat mengatur anggota petani pemakai air berperilaku selaras dengan lingkungan akan mencerminkan suatu totalitas kinerja kehidupan sosial dan pengelolaan sistem irigasi yang khas.

Seringkali generalisasi pengaturan kebijakan dalam pengelolaan irigasi tanpa memperhatikan sistem nilai dan norma sosial setempat akan dihadapkan pada banyak masalah dan kendala. Apalagi jika hal ini terjadi pada masyarakat majemuk yang memiliki karakteristik yang khas dan budaya berbeda tentunya perlu menjadi pertimbangan kebijakan pengelolaan irigasi. Demikian juga pada sistem irigasi kewenangan pusat yang berskala luas dan multi fungsi akan berimplikasi pada banyaknya pemanfaat air irigasi selain untuk kebutuhan pertanian. Hal ini tentunya membutuhan inovasi teknis (*technical innovation*) dan inovasi kelembagaan (*institutional innovation*) yang terintegrasi. Inovasi teknis pada dasarnya inovasi antara lain menyangkut aspek alokasi air, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi, pengelolaan asset dan sistem informasi yang mendukung. Sedangkan inovasi kelembagaan berkaitan dengan sistem kebijakan, pengaturan kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusianya.

Sistem kelembagaan pengelolaan irigasi tentunya mengandung elemen-elemen peran, partisipasi, sistem teknologi, struktur dan tujuan yang memiliki interdependensi satu sama lainnya. Manurut Rachman, Pasandaran, dan Kariyasa (2002)[1], dalam konteks kelembagaan rigasi terdapat 3 aspek penting yang sangat berperan, yaitu:

1. Batas yurisdiksi (*jurisdiction boundary*). Hal ini dipahami sebagai batas otoritas suatu lembaga dalam mengatur sumber daya air dan irigasi, yang umumnya berdasarkan batas hidrologis (seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan lainnya);
2. Hak kepemilikan (*proverty rights*), yaitu hak setiap individu petani pemakai air untuk mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankannya; dan
3. Aturan representasi (*rule of representation*), yaitu aturan yang telah disepakati dengan tujuan untuk menjamin terjadinya keseimbangan antara hak atas pelayanan air irigasi yang diperoleh dengan besarnya kewajiban yang dibebankan.

[1] Benny Rachman, Effendi Pasandaran, dan Ketut Kariyasa. 2002. Kelembagaan Irigasi Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Keterpaduan aspek teknis dan aspek kelembagaan dalam pengelolaan irigasi akan berpengaruh terhadap hasil (*outcome*), efisiensi, dan optimasi pengalokasian sumber daya air dan irigasi. Lemahnya keterpaduan aspek teknis dan sistem kelembagaan seringkali menimbulkan konflik manajamen sumber daya air dan irigasi. Oleh karena itu kejelasan kesepakatan pelayanan irigasi (*irrigation service agreement*) akan merefleksikan hak dan tanggungjawab serta peran pelaku atau pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sistem irigasi.

Keterpaduan aspek teknis dan sistem kelembagaan pengelolaan irigasi akan menjadi bagian dari muatan persiapan modernisasi irigasi di Indonesia. Melalui program SIMURP, inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan akan dikembangkan untuk mendukung pengelolaan irigasi berbasis modernisasi irigasi. Pendekatan modernisasi irigasi yang diletakkan pada 5 (lima) pilar merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada peningkatan layanan irigasi (*Level of Irrigation Service*) atas dasar sistem pengelolaan irigasi secara utuh, efektif, efisien dan berkelanjutan serta untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Indonesia dalam rangka modernisasi sistem irigasi melalui pendekatan 5 (lima) pilar irigasi yaitu:

1. Ketersediaan air;
2. Infrastruktur irigasi;
3. Pengelolaan irigasi;
4. Institusi irigasi; dan
5. Manusia pelaku dalam pengelolaan irigasi.

Modernisasi irigasi merupakann suatu tindakan pengelolaan irigasi ke depan yang bernuansa pembaharuan baik secara manajerial, institusional maupun teknikal dalam lingkup pelaksanaan pengelolaan irigasi termasuk unsur manusia sebagai pengelolanya. Oleh karena itu kelima pilar modernisasi irigasi saling berkaitan satu sama lain dan perlu diwujudkan secara terpadu.

Pilar kelembagaan menjadi bagian dari proses inovasi kelembagaan dalam pengelolaan irigasi pada masa mendatang. Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri atas institusi pemerintah, institusi petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) atau nama lain, dan institusi koordinasi (Komisi Irigasi) yang bersama-sama membentuk institusi yang kuat dan fleksibel sesuai dengan karakteristik lokal berdasarkan sistem manajemen imbalan *(provisi)*. Artinya bahwa meskipun institusi pemerintah bertanggung jawab di tingkat

sistem jaringan utama dan petani di jaringan tersier tetapi institusi pemerintah berkewajiban untuk melayani petani sesuai dengan tujuan manajemen yang disepakati bersama.

Pengembangan kelembagaan pengelolaan irigasi ini juga akan memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan internet sehingga membentuk dan meningkatkan pengetahuan para pelaku dalam pengelolaan irigasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) akan menimbulkan gelombang baru dalam sistem pengelolaan yang berbasis pengetahuan sehingga pengelolaan pengetahuan *(knowledge management)* dalam pengembangan institusi dan manusia pelakunya sampai dengan terwujudnya KMC (*Knowledge Management Center*) dan mengupayakan terbentuknya UPIM (Unit Pengelola Irigasi Modern) yang otonom dalam mengelola suatu daerah irigasi, termasuk yang menjadi kewenangan pusat berskala luas dan strategis nasional.

Melalui program SIMURP, penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi akan didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku pengelolaan irigasi. Pengembangan kapasitas pelaku baik yang berasal dari pemerintah dan petani dilakukan dengan asas *Human Capital*. Azas *human capital* berbeda dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia pada saat ini karena asas ini memakai asas pengembangan kapasitas manusia sebagai manusia yang utuh dan bukan hanya sekedar masukan dalam sistem produksi.

Dengan memakai asas ini, maka sebagai manusia yang mempunyai kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan juga spiritual ditempatkan pada posisi sentral/utama dalam pengembangan pengelolaan sistem irigasi. Pelaksanaan pengelolaan SDM berbasis pada *Human Capital* dan pengelolaan pengetahuan akan saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lainnya. Dengan demikian inovasi kelembagaan melalui dukungan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi strategis dalam mendukung ketiga pilar modernisasi lainnya.

Untuk lebih jelasnya kelembagaan pengelola irigasi yang terlibat dalam kegiatan SIMURP, meliputi :

– Balai Besar / Balai Wilayah Sungai;
– Dinas PU / Dinas SDA / Dinas PSDA Provinsi;
– Dinas PU / Dinas SDA / Dinas PSDA Kabupaten;
– Perum Jasa Tirta II (khusus untuk DI Jatiluhur dan DI Cipancuh);

– Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A, GP3A, IP3A) atau dengan nama lain;
– Komisi Irigasi Provinsi;
– Komisi Irigasi Kabupaten.

1.5. Komponen SIMURP

Program SIMURP yang dikembangkan melalui dana pinjaman Bak Dunia (IBRD *Loan* No. 8891-ID) dan AIIB (*Loan* No. L0060A) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan inovasi teknologi dan inovasi kelembagaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan irigasi dengan pendekatan modernisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan sistim irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan sistim irigasi pada beberapa daerah irigasi terpilih. Penerima manfaat utama proyek adalah rumah tangga petani yang secara langsung mendapatkan manfaat dari layanan (alokasi dan distribusi) air irigasi yang lebih andal, tahan iklim, dan efisien, peningkatan produktivitas pertanian melalui peningkatan pengelolaan air irigasi dan intervensi pertanian cerdas iklim. Rumah tangga petani pemanfaat proyek tersebut meliputi 300.000 rumah tangga petani pada areal seluas 100.000 ha dalam sistim irigasi Pusat (Komponen A), dan 587.000 rumah tangga petani pada areal seluas 176.000 ha dalam sistim irigasi strategis nasional di Jatiluhur (Komponen B). Selain itu juga penerima manfaat proyek lainnya mencakup kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A), dan komisi irigasi.

Komponen kegiatan SIMURP meliputi 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1) Komponen A, Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak.
   Komponen A SIMURP terdiri dari 4 (empat) sub komponen, yaitu:
   - Sub komponen A1, yaitu Rehabilitasi dan Revitalisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase
   - Sub komponen A2, yaitu Revitalisasi Pengelolaan Irigasi
   - Sub komponen A3, yaitu Peningkatan Pengaturan Kelembagaan
   - Sub komponen A4, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
2) Komponen B, Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis.
   Komponen B SIMURP terdiri dari 4 (empat) sub komponen, yaitu:

- Sub komponen B1, yaitu Revitalisasi dan Modernisasi Infrastruktur Irigasi dan Drainase
- Sub komponen B2, yaitu Modernisasi Pengelolaan Irigasi
- Sub komponen B3, yaitu Pembangunan Institusi Berkelanjutan
- Sub komponen B4, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia

3) Komponen C, Pengelolaan Proyek. Komponen C SIMURP meliputi dukungan kegiatan, yaitu:
   - Operasional Kesekretariatan
   - Dukungan Kegiatan NSCWR (IMEU dan Operasional)
   - Dukungan Bantuan teknis (konsultan)
   - Penambahan biaya operasional NSCWR, CPMU, CPIU, dan NPIU/PIU (*The incremental Operating Cost*)

BAB II
KEGIATAN PENINGKATAN PENGATURAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI-SERTA PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Secara umum kegiatan peningkatan pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam program SIMURP dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi dalam memenuhi tingkat layanan irigasi (*level of service*) secara efektif, efisien, partisipatif dan berkelanjutan melalui dukungan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi sehingga dapat mendukung capaian layanan irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan sistim irigasi di daerah-daerah terpilih; dan
2) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan irigasi sehingga terbangun tatakelola sistim irigasi kewenangan pusat secara partisipatif dan kolaboratif.

Untuk mencapai tujuan peningkatan pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan baik yang ditetapkan dalam komponen A (Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak) maupun komponen B (Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis), khususnya pada subkomponen peningkatan pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi dan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola irigasi untuk Komponen A sedangkan untuk Komponen B pada sub komponen pembangunan institusi berkelanjutan serta pengembangan sumber daya manusia.

2.1. Peningkatan Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Kegiatan peningkatan pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam program SIMURP yang direncanakan baik pada komponen A maupun komponen B akan dilaksanakan oleh beberapa unit pelaksana kegiatan, yaitu CPIU Irigasi dan Rawa, NPIU OP-PSDA Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, NPIU Bangda Kementerian Dalam Negeri, NPIU BPPSDM Kementerian Pertanian, dan Balai (B/BWS) lokasi daerah irigasi kegiatan SIMURP. Uraian penjelasan kegiatannya dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Komponen A: Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak

Kegiatan peningkatan pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam komponen kegiatan A mencakup 5 (lima) kegiatan utama yaitu sebagai berikut:

- Pembaharuan Manual, Panduan dan Peraturan;
- Pembentukan Instansi Irigasi;
- Peningkatan Koordinasi dan Dukungan Antar Instansi Terkait;
- Pengembangan Kerjasama di Bidang O&P;
- Integrasi Perencanaan Sumber Daya Air Pada Dokumen Perencanaan Daerah.

2.1.1.1. Pembaharuan Manual/Pedoman, Panduan, dan Peraturan.

Kegiatan ini mencakup 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu: (A) Penyusunan panduan; (B) pembaharuan panduan; dan (C) sosialisasi pedoman/panduan. Penjelasan masing-masing rincian kegiatan dan pelaksana kegiatannya diuraikan sebagai berikut:

A. Rincian Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Panduan sebagai berikut:
   1. Penyusunan Pedoman Evaluasi Kinerja PPSIP. Pelaksana kegiatan ini adalah CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   2. Penyusunan Pedoman Revitalisasi Sistem Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa. Pelaksana kegiatan ini adalah CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   3. Penyusunan Pedoman CSA. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Direktorat Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian; (harus sesuai dengan POM Buku 6)
   4. Penyusunan kerangka kerja keamanan sosial dan lingkungan (ESMF) untuk revitalisasi sistem irigasi permukaan dan irigasi rawa. Pelaksana kegiatan ini adalah CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (harus sesuai dengan POM Buku 3)
   5. Penyusunan Pedoman *Smart Irrigation Sistem*. Pelaksana kegiatan ini adalah CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
   6. Penyusunan Konsep dan Pedoman Penyuluhan Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Rincian Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Pembaharuan Panduan sebagai berikut:
   1. Penyusunan Pedoman/panduan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (RP2I). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   2. Penyusunan pedoman pengarusutamaan perspektif gender dalam PPSIP. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
   3. Penyusunan pedoman peningkatan kapasitas Komir. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
   4. Pembaharuan pedoman umum Sosialisasi PPSIP. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
   5. Pembaharuan pedoman pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   6. Pembaharuan materi/modul pelatihan/lokakarya Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
   7. Pembaharuan panduan pendampingan TPM. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

C. Rincian Kegiatan Sosialisasi Panduan sebagai berikut:
   1. Sosialisasi Pedoman PPSIP. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
   2. Sosialisasi Pedoman RP2I. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   3. Sosialisasi Panduan Penguatan KPI dan Peningkatan Kapasitas Komisi Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
   4. Sosialisasi Panduan Pengelolaan Air Irigasi dan Pertanian Cerdas Iklim. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Direktorat Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian bersama Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (harus sesuai dengan POM Buku 6)

5. Sosialisasi Pelaksanaan PPSIP dan Pengarusutamaan Jender dalam PPSIP. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
6. Sosialisasi Pelaksanaan Revitalisasi Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.1.2. Pembentukan Kelembagaan Irigasi

Kegiatan ini diwujudkan melalui pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). Rincian kegiatan dan pelaksana kegiatannya sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi pengelolaan irigasi di B/BWS. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pembentukan/Revitalisasi dan penetapan SK Gubernur tentang Komisi Irigasi Provinsi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
3. Pembentukan/Revitalisasi dan penetapan SK Bupati tentang Komisi Irigasi Kabupaten. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Pembentukan dan fungsionalisasi Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Sinkronisasi dan Konsolidasi Tugas, Fungsi dan Peran KPI. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
6. Fasilitasi pembentukan Satgas Penyuluhan pengairan. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
7. Fasilitasi pembentukan Satuan Tugas mobile pemeliharaan khusus (SPKM). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.1.3. Peningkatan Koordinasi dan Dukungan Antar Instansi Terkait

Kegiatan peningkatan koordinasi dan dukungan antar instansi terkait dan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya diwujudkan melalui evaluasi efektivitas peran kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI) dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif (PPSIP). Rincian kegiatan dan pelaksana kegiatannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Peran KPI dalam PPSIP. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
2. Penilaian Peringkat Partisipasi GP3A/IP3A dalam O&P. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU B/BWS Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.1.4. Pengembangan Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan

Kegiatan ini diwujudkan melalui pembentukan kontrak manajemen bersama pihak ketiga yang akan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) balai (B/BWS) peserta proyek SIMURP pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP). Pelaksana kegiatan ini adalah PIU B/BWS Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

2.1.1.5. Integrasi Perencanaan Sumber Daya Air Dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Kegiatan integrasi perencanaan sumber daya air dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ini diwujudkan. Melalui internalisasi PPSIP dalam Pola dan Rencana Pengelolaan SDA yang tertuang pada dokuman rencana pembangunan daerah. Kegiatan internalisasi PPSIP dalam dokumen perencanana merupakan salah satu target yang ditetapkan sebagai indikator hasil antara (*intermediate results indictors*) sebanyak 20 dokumen perencanaan pembangunan baik di provinsi maupun kabupaten lokasi daerah irigasi program SIMURP, kegiatan ini merupakan tanggungjawab NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Catatan : untuk uraian setiap kegiatan yang dilaksanakan mohon dilengkapi dengan keluaran yang diharapkan.

2.1.2. Komponen B: Modernisasi Sistim Irigasi dan Drainase Strategis

Kegiatan sub komponen Peningkatan Pengaturan Kelembagaan dalam Komponen B mencakup 6 (enam) kegiatan utama yaitu sebagai berikut :

– Pembaharuan manual, panduan dan peraturan terkait modernisasi;
– Pembentukan kelembagaan irigasi;
– Pengembangan fungsi keberlanjutan kelembagaan;
– Pengembangan kerjasama di bidang O & P;
– Integrasi perencanaan sumber daya air pada dokumen perencanaan daerah;
– Pengembangan insentif P3A

2.1.2.1. Pembaharuan Pedoman, Panduan, dan Peraturan.

Kegiatan ini diwujudkan melalui penyusunan dan sosialisasi panduan tentang 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Penyusunan studi keberlanjutan kelembagaan irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NIPU OP-PSDA pada Direktorat Penatagunaan Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya 1 (satu) dokumen studi yang memberikan rekomendasi terkait strategi keberlanjutan kelembagaan irigasi menuju modernisasi irigasi pada masa mendatang. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keberadaan PJT II sebagai salah-satu pengelola D.I Jatiluhur.
2. Penyusunan pedoman keberlanjutan kelembagaan irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NIPU OP-PSDA pada Direktorat Penatagunaan Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya 1 (satu) pedoman keberlanjutan kelembagaan irigasi menuju modernisasi irigasi pada masa mendatang.
3. Sosialisasi keberlanjutan kelembagaan irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NIPU OP-PSDA pada Direktorat Penatagunaan Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya 1 (satu) dokumen studi yang memberikan rekomendasi terkait strategi keberlanjutan kelembagaan irigasi menuju modernisasi irigasi pada masa mendatang.

2.1.2.2. Pembentukan Kelembagaan Irigasi

Kegiatan ini difokuskan pada kelembagaan pengelolaan irigasi yang diwujudkan dalam 12 (duabelas) kegiatan, yaitu:

1. Penguatan fungsi pengelolaan irigasi di B/BWS. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi pengelolaan irigasi di BBWS Citarum.
2. Pembentukan dan fungsionalisasi Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya sebanyak 2 (dua) FKDI pada sistim irigasi Jatiluhur, yaitu di Subsistem Tarum Timur dan Subsistem Tarum Utara. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keberadaan PJT II sebagai salah-satu pengelola D.I Jatiluhur.
3. Penilaian Pembentukan Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM). Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA). Keluaran kegiatan ini adalah adanya Unit Pengelola Irigasi Modern (UPIM) pada sistim irigasi Jatiluhur. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keberadaan PJT II sebagai salah-satu pengelola D.I Jatiluhur.
4. Sosialisasi penataan ulang tugas dan tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi Jatiluhur. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah redefinisi tugas dan tanggungjawab pengelolaan sistem irigasi Jatiluhur.
5. Pembentukan/Revitalisasi dan penetapan SK Gubernur tentang Komisi Irigasi Provinsi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah adanya SK Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat.;
6. Pembentukan/Revitalisasi dan penetapan SK Bupati tentang Komisi Irigasi Kabupaten. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah adanya konsep revisi penyunsan dan penetapan SK Bupati tentang Komisi Irigasi Kabupaten Subang dan Komisi Irigasi Kabupaten Karawang;
7. Pembentukan subkomisi irigasi Jatiluhur sebagai bagian dari Komisi Irigasi Jawa Barat. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA), dalam pelaksanaannya harus bersama dengan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dan PJT II. Keluaran kegiatan ini adalah subkomisi irigasi Jatiluhur sebagai bagian dari Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat;

8. Sinkronisasi dan Konsolidasi Tugas, Fungsi dan Peran KPI. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah adanya rumusan sinkronisasi dan konsolidasi tugas, fungsi, dan peran Kelembagaan Pengelolaan Irigasi pada sistim irigasi Jatiluhur; Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keberadaan PJT II sebagai salah-satu pengelola D.I Jatiluhur.
9. Fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Unit Pengelola Irigasi Modern. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA). Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya Satuan Tugas Unit Pengelola Irigasi Modern (Satgas UPIM);
10. Fasilitasi pembentukan Satgas Penyuluhan Pengairan. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya Satuan Tugas Penyuluhan Pengairan;
11. Fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Mobile Pemeliharaan Khusus. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya Satuan Tugas Unit Mobile Pemeliharaan Khusus (Satgas MPK); dan
12. Fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya Satuan Tugas Pengamanan Irigasi (SPI).

    Catatan :

    Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi Jatiluhur harus memperhatikan keberadaan PJT II sebagai salah-satu pengelola D.I. Jatiluhur.

2.1.2.3. Pengembangan Keberlanjutan Fungsi Kelembagaan Irigasi

Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 (lima) kegiatan yang mendukung pengembangan fungsi kelembagaan irigasi secara berkelanjutan, yaitu:

1. Monitoring dan Evaluasi Fungsi Kelembagaan Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi fungsi kelembagaan irigasi pada sistem irigasi Jatiluhur;

2. Pembentukan Komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten serta PJT II untuk Mempertahankan Fungsi Kelembagaan Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah adanya penandatanganan naskah kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) terkait dengan keberlanjutan fungsi kelembagaan irigasi pada sistem irigasi Jatiluhur;
3. Penyediaan personil pendukung KPI. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya 15 orang personil untuk mendukung UPIM pada sistem irigasi Jatiluhur;
4. Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Peran KPI dalam PPSIP. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi efektivitas peran KPI dalam PPSIP; dan
5. Penilaian Peringkat Partisipasi GP3A/IP3A dalam O&P. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Keluaran kegiatan ini adalah adanya nilai partisipasi GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sistim irigasi Jatiluhur.

2.1.2.4. Pengembangan Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan

Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 (dua) kegiatan yang mendukung pengembangan kerjasama operasi dan pemeliharaan pada sistim irigasi Jatiluhur, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Alternatif Pengembangan Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan sebagai bentuk persiapan *Irrigation Service Agreement* (ISA). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen hasil studi alternatif pengembangan kerjasama operasi dan pemeliharaan pada sistem Jatiluhur; dan
2. Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Operasi dan Pemeliharaan sebagai bentuk pelaksanaan *Irrigation Service Agreement* (ISA). Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya kerjasama operasi dan pemeliharaan pada sistim irigasi Jatiluhur.

Catatan : Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pengaturan kelembagaan pengelolaan irigasi Jatiluhur harus memperhatikan keberadaan PJT II sebagai salah-satu pengelola D.I. Jatiluhur.

2.1.2.5. Integrasi Perencanaan Sumber Daya Air pada Dokumen Perencanaan Daerah.

Kegiatan integrasi perencanaan sumber daya air dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah ini diwujudkan. Melalui internalisasi PPSIP dalam Pola dan Rencana Pengelolaan SDA yang tertuang pada dokuman rencana pembangunan daerah (RPJPD / RPJMD / RTRW). Kegiatan internalisasi PPSIP dalam dokumen perencanana merupakan salah satu target yang ditetapkan sebagai indikator hasil antara (*intermediate results indictors*) pada Komponen B sebanyak 4 dokumen perencanaan pembangunan baik di provinsi maupun kabupaten lokasi daerah irigasi program SIMURP, kegiatan ini merupakan tanggungjawab NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

2.1.2.6. Pengembangan Insentif Perkumpulan Petani Pemakai Air

Kegiatan ini diwujudkan melalui 12 (duabelas) kegiatan yang mendukung pengembangan insentif per pada sistim irigasi Jatiluhur, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Alternatif insentif perkumpulan petani pemakai air. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya hasil studi pengembangan insentif baik berupa pengadaan computer, alat komunikasi, alat tarnsportasi bagi perkumpulan petani pemakai air pada sistem irigasi Jatiluhur. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari persiapan penyusunan dan penetapan kesepakatan layanan irigasi (*irrigation service agreement,* atau ISA).
2. Pembuatan pedoman insentif perkumpulan petani pemakai air. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA). Keluaran kegiatan ini adalah adanya pedoman dalam pemberian insentif kepada perkumpulan petani pemakai air pada sistim irigasi Jatiluhur sebagai acuan dalam proses pemberian insentif kepada perkumpulan petani pemakai air di lokasi kegiatan SIMURP DI Jatiluhur, kegiatan ini sebagai bentuk persiapan adanya ISA.

3. Pelaksanaan pemberian insentif bagi perkumpulan petani pemakai air. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA). Keluaran kegiatan ini adalah adanya pemberian insentif kepada sejumlah 583 unit perkumpulan petani pemakai air pada sistim irigasi Jatiluhur baik berupa pengadaan computer, alat komunikasi, alat tarnsportasi sesuai pedoman yang sudah ditetapkan.
4. Fasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air (unit P3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya sejumlah 1.792 unit P3A pada sistim irigasi Jatiluhur.
5. Fasilitasi revitalisasi perkumpulan petani pemakai air (unit P3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah terevitalisasinya sejumlah 122 unit P3A secara aktif dan fungsional pada sistim irigasi Jatiluhur.
6. Fasilitasi pembentukan gabungan perkumpulan petani pemakai air (Gabungan P3A/GP3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya sejumlah 170 GP3A pada sistim irigasi Jatiluhur. Catatan : mohon didiskusikan dan dipastikan unit pelaksananya, NPIU OP atau Balai ?
7. Fasilitasi revitalisasi gabungan perkumpulan petani pemakai air (Gabungan P3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah terevitalisasinya sejumlah 64 GP3A secara aktif dan fungsional pada sistim irigasi Jatiluhur.
   Catatan : mohon didiskusikan dan dipastikan unit pelaksananya, NPIU OP atau Balai ?
8. Fasilitasi pembentukan induk perkumpulan petani pemakai air (Induk P3A/IP3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah terbentuknya sejumlah 1 IP3A pada sistim irigasi Jatiluhur.
   Catatan : mohon didiskusikan dan dipastikan unit pelaksananya, NPIU OP atau Balai ?
9. Fasilitasi revitalisasi induk perkumpulan petani pemakai air (induk P3A/IP3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina

Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah terevitalisasinya sejumlah 17 IP3A secara aktif dan fungsional pada sistim irigasi Jatiluhur.

Catatan : mohon didiskusikan dan dipastikan unit pelaksananya, NPIU OP atau Balai ?

10. Fasilitasi legalisasi badan hukum perkumpulan petani pemakai air (unit P3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran kegiatan ini adalah adanya sejumlah 1.914 unit P3A pada sistim irigasi Jatiluhur yang sudah memiliki AD/ART melalui SK Camat/SK Bupati serta berbadan hukum akte notaris dan terdaftar dalam pengadilan negeri.
11. Fasilitasi legalisasi badan hukum gabungan perkumpulan petani pemakai air (Gabungan P3A/GP3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya sejumlah 234 GP3A pada sistim irigasi Jatiluhur yang sudah memiliki AD/ART melalui SK Camat/SK Bupati serta berbadan hukum akte notaris dan terdaftar dalam pengadilan negeri.

    Catatan : mohon didiskusikan dan dipastikan unit pelaksananya, NPIU OP atau Balai ?
12. Fasilitasi pembentukan induk perkumpulan petani pemakai air (Induk P3A/IP3A). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya sejumlah 18 IP3A pada sistim irigasi Jatiluhur yang sudah memiliki AD/ART melalui SK Camat/SK Bupati serta berbadan hukum akte notaris dan terdaftar dalam pengadilan negeri.

    Catatan : mohon didiskusikan dan dipastikan unit pelaksananya, NPIU OP atau Balai ?

2.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia irigasi dalam program SIMURP yang direncanakan baik pada komponen A maupun komponen B akan dilaksanakan oleh beberapa unit pelaksana kegiatan, yaitu CPIU Irigasi dan Rawa, NPIU OP-PSDA Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya, NPIU Bangda

Kementerian Dalam Negeri, NPIU BPPSDM Kementerian Pertanian, dan Balai (B/BWS) peserta kegiatan SIMURP. Uraian penjelasan kegiatannya dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Komponen A: Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam Komponen A ada pada Sub Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mencakup 3 (tiga) kegiatan utama yaitu:

- Pelatihan staf instansi pemerintah dalam operasi jaringan irigasi;
- Pembentukan dan pelatihan organisasi pengguna air;
- Pelatihan gender dan lingkungan.

2.2.1.1. Pelatihan Staf Instansi Pemerintah Dalam Operasi Jaringan Irigasi.

Kegiatan ini mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: (a) Peningkatan Kapasitas KPI dalam Kerangka Pelaksanaan PPSIP; (b Peningkatan Kapasitas KPI dalam Kerangka Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI); (c) Peningkatan Kapasitas KPI dalam Kerangka Pelaksanaan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (PROM); dan (d) Peningkatan Kapasitas KPI dalam rangka Penyusunan RP2I. Rincian masing-masing kegiatan diatas dijelaskan sebagai berikut :

A. Rincian Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPI dalam Kerangka Pelaksanaan PPSIP meliputi :
    1. Pelatihan Pelatih (TOT) tentang Desain, Konstruksi dan OP Partisipatif untuk staf OP, Perencanaan dan PJPA di B/BWS. Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa bersama NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya pelatih untuk pelatihan disain, konstruksi dan operasi pemeliharaan partisipatif untuk staf B/BWS.
    2. Pelatihan/Lokakarya tentang Koordinasi Perencanaan PPSIP tingkat Daerah Irigasi Kewenangan Pusat. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan hasil pelatihan/lokakarya terkait mekanisme koordinasi perencanaan PPSIP pada Daerah Irigasi kewenangan pusat.
    3. Pelatihan / Lokakarya "Koordinasi Perencanaan PPSIP" untuk irigasi kewenangan pusat. Pelaksana kegiatannya adalah setiap Balai (B/BWS) pada Satker

Perencanaan. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan hasil pelatihan/lokakarya terkait mekanisme koordinasi perencanaan PPSIP pada 14 Daerah Irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.

4. Pelatihan/lokakarya bagi staf B/BWS, Dinas PUP/SDA Provinsi dan Kabupaten, PJT II khusus untuk DI Cipancuh tentang "Desain, Konstruksi dan Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif". Pelaksana kegiatannya adalah setiap Balai (B/BWS) pada Satker Operasi dan Pemeliharaan. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan staf B/BWS, Dinas PUP/SDA Provinsi dan Kabupaten dalam hal "Desain, Konstruksi dan Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif".
5. Pelatihan penguatan fungsi pengelolaan irigasi di B/BWS. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil pelatihan penguatan fungsi pengelolaan irigasi pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
6. Pelatihan/Lokakarya peningkatan kapasitas bagi Sekretariat dan Anggota Komir Provinsi dan Komir Kabupaten. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan staf sekretariat dan anggota Komir Provinsi dan Komir Kabupaten mencakup 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
7. Fungsionalisasi Komir melalui rapat penyusunan program dan kegiatan PPSIP periode 5 tahun dan 1 tahun. Pelaksananya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil pertemuan Fungsionalisasi Komir melalui rapat penyusunan program dan kegiatan PPSIP periode 5 tahun dan 1 tahun mencakup 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
8. Pelatihan bagi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Pelaksananya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
9. Pelatihan dan Penyusunan PSETKL dengan metoda PPKDI. Pelaksananya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil pelatihan dan Penyusunan PSETKL dengan metoda PPKDI pada 14 Daerah Irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
10. Pembentukan Unit Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam B/BWS. Pelaksana kegiatan adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber

Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya tersedianya pembentukan unit pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A di setiap B/BWS pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.

11. Pelatihan Peningkatan kapasitas / lokakarya untuk anggota TKPSDA – WS dan Dewan SDA. Pelaksana kegiatan adalah B/BWS. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan anggota TKPSDA – WS dan anggota Dewan Sumber Daya Air lokasi SIMURP.

B. Rincian Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPI dalam Kerangka Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) sebagai berikut :

1. Pelatihan untuk pelatih Pengeloalaan Aset Irigasi (PAI)/WAMI dan Benchmarking (IKSI). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya instruktur untuk pelatihan Pengeloalaan Aset Irigasi (PAI)/WAMI dan Benchmarking (IKSI).
2. Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)/WAMI untuk staf B/BWS. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan staf B/BWS dalam PAI/WAMI.

C. Rincian Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPI dalam Kerangka Pelaksanaan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (PROM) sebagai berikut:

1. Pelatihan OP untuk Juru (Pemula, Madya, dan Utama). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan tenaga pelaksana juru pengairan baik tenaga juru pemula, madya, dan utama dalam hal OP pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
2. Pelatihan Staf Pelaksana Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (Pemula, Madya, dan Utama). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan

staf O&P dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.

2.2.1.2. Pembentukan dan Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Kegiatan ini mencakup 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu: (a) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; (b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI); dan (c) Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Rincian masing-masing kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

A. Rincian Kegiatan yang berkaitan dengan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi terdiri dari :
   1. Adanya koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan TPM.Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan dukungan manajemen terkait kegiatan pendampingan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) oleh sejumlah Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan KTPM pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   2. Proses pengadaan TPM dan KTPM.

B. Rincian Kegiatan Peningkatan Kapasitas KPI adalah sebagai berikut:
   1. Fasilitasi Pembentukan P3A. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi pembentukan unit P3A pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   2. Fasilitasi Revitalisasi P3A. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi revitalisasi unit P3A pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   3. Fasilitasi Pembentukan GP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS). Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi pembentukan Gabungan P3A (GP3A) pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   4. Fasilitasi Revitalisasi GP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS). Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi revitalisasi Gabungan P3A (GP3A) pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.

   5. Fasilitasi Pembentukan IP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS). Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi pembentukan Induk P3A (IP3A) pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   6. Fasilitasi Revitalisasi IP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS). Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi revitalisasi Induk P3A (IP3A) pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   7. Fasilitasi Legalisasi Badan Hukum P3A. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi legalisasi badan hukum P3A pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   8. Fasilitasi Legalisasi Badan Hukum GP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS) pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) yang ada di komponen A. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi legalisasi badan hukum Gabungan P3A (GP3A) pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   9. Fasilitasi Legalisasi Badan Hukum IP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS) pada Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) yang ada di komponen A. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan yang berisikan fasilitasi legalisasi badan hukum Induk P3A (IP3A) pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.

C. Rincian Kegiatan Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah sebagai berikut:
   1. Pelatihan untuk Pelatih tentang Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah tersedianya instruktur untuk pelatihan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   2. Pelaksanaan Penyuluhan P3A/GP3A/IP3A tentang Pengelolaan Air. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS). Keluarannya adalah adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan P3A/GP3A/IP3A tentang pengelolaan irigasi pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.
   3. Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A termasuk Pelatihan Manajemen Organisasi dan Keuangan, Desain, Konstruksi dan OM Partisipatif. Pelaksana kegiatan ini adalah PIU Balai (B/BWS). Keluarannya adalah adanya

dokumen laporan kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A termasuk pelatihan manajemen organisasi dan keuangan, desain, konstruksi dan operasi dan pemeliharaan partisipatif pada 14 daerah irigasi kewenangan pusat lokasi SIMURP.

4. Program Studi Banding Petani ke Provinsi/Kabupaten Lain di Indonesia Dalam Pengelolaan Air dan Pendapatan Petani, pelaksanaannya disesuaikan dengan POM Buku 6. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan program studi banding petani ke provinsi/kabupaten lain di Indonesia dalam pengelolaan air dan peningkatan pendapatan petani.

2.2.1.3. Pelatihan Lingkungan dan Jender

Kegiatan ini mencakup 2 (dua) kegiatan utama, yaitu: (a) Pengelolaan Irigasi Dalam Perspektif Jender; dan (b) Kerangka Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (*Environmental and Social Management Framework*/ESMF).

Rincian masing-masing kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

A. Rincian Kegiatan Pengelolaan Irigasi Dalam Perspektif Jender sebagai berikut:

1. Lokakarya perspektif jender dalam PPSIP dan peningkatan kapasitas perempuan. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran yang diharapkan adalah adanya dokumen laporan kegiatan lokakarya perspektif jender dalam PPSIP dan peningkatan kapasitas perempuan.
2. Lokakarya fasilitasi peralatan pengolahan industri rumah tangga hasil pertanian. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan lokakarya fasilitasi peralatan pengolahan industri rumah tangga hasil pertanian.

B. Rincian Kegiatan Kerangka Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (*Environmental and Social Management Framework*/ESMF) adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kerangka Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (*Environmental and Social Management Framework*/ESMF). Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan kegiatan Sosialisasi Kerangka Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (*Environmental and Social Management Framework*/ESMF).

2. Pelatihan Pengamanan Lingkungan dan Sosial. Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan kegiatan pelatihan Pengamanan Lingkungan dan Sosial.
3. Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan kegiatan pelatihan pengawasan pengelolaan lingkungan dan sosial.

Catatan : Kegiatan di atas harus disesuaikan dengan POM Buku 3.

2.2.2. Komponen B: Modernisasi Sistim Irigasi dan Drainase Strategis

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam Komponen B ada pada Sub Komponen Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu:

- Pengembangan dan pengelolaan pengetahuan;
- Pengembangan staf dan pejabat pemerintah dalam modernisasi operasi jaringan irigasi;
- Pengembangan petani pemakai air irigasi;
- Pelatihan gender dan lingkungan.

2.2.2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Pengetahuan

Pengembangan dan pengelolaan pengetahuan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dalam kerangka PPSIP mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Studi Pengelolaan Irigasi Sesuai Kearifan Lokal. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan hasil studi pengelolaan irigasi sesuai kearifan local pada sisim irigasi Jatiluhur.
2. Harmonisasi Pengelolaan Irigasi Antara Pengetahuan Lokal dan Teknis. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan hasil harmonisasi pengelolaan irigasi antara pengetahuan lokal dan teknis pada sisim irigasi Jatiluhur.
3. Pengaturan Kompetensi dan Kapasitas Staf Operasi dan Petani Berdasarkan Harmonisasi Pengelolaan Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen pengaturan kompetensi dan kapasitas staf

operasi dan petani berdasarkan harmonisasi pengelolaan irigasi pada sisim irigasi Jatiluhur.

4. Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengelolaan Pengetahuan (*Knowledge Management Centre*). Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan kegiatan fasilitasi pembentukan pusat pengelolaan pengetahuan (*knowledge management centre*) pada sistim irigasi Jatiluhur.

2.2.2.2 Pengembangan Staf dan Pejabat Pemerintah Dalam Modernisasi Operasi Jaringan Irigasi.

Kegiatan ini mencakup 4 (empat) kegiatan utama, yaitu: (a) Pengembangan dan Penguatan Komptensi; (b) Pusat Pengembangan Karir; (c) Peningkatan Kapasitas KPI Dalam Kerangka Pengelolaan Aset; (d) Peningkatan Kapasitas KPI Dalam Kerangka SCADA; (e) Peningkatan Kapasitas KPI Dalam Kerangka Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (PROM); dan (f) Puslitbang Sumber Daya Air / Balai Irigasi.

Rincian masing-masing kegiatan diatas dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengembangan dan Penguatan Komptensi

Pengembangan dan penguatan kompetensi ini tidak hanya ditujukan untuk staf dan pejabat pemerintah, tapi juga ditujukan pada staf dan pejabat PJT II, kegiatan ini meliputi:

1. Studi Kebutuhan Modernisasi Irigasi untuk Pengelolaan Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil studi kebutuhan modernisasi irigasi untuk pengelolaan irigasi.
2. Pelatihan Staf tentang Modernisasi Operasi dan Pemeliharaan dan Sistim Informasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan staf tentang modernisasi operasi dan pemeliharaan dan sistim informasi.
3. Pelatihan untuk Tenaga Pelatih Disain, Konstruksi, dan Operasi Pemeliharaan. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan bersama CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah tersedianya tenaga pelatih untuk pelatihan disain, konstruksi, dan operasi pemeliharaan.

4. Pelatihan Disain dan Konstruksi Partisipatif untuk Staf B/BWS, Dinas Provinsi dan Kabupaten serta staf PJT II. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya staf yang memahami pekerjaan disain dan konstruksi partisipatif.
5. Pelatihan "OP partisipatif" untuk staf BBWS Citarum, Dinas Provinsi dan Kabupaten serta PJT II. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya staf yang memahami tentang OP partisipatif.
6. Pelatihan untuk Staf Balai tentang Konsep dan Tata Cara Modernisasi Irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah tersedianya staf BBWS Citarum yang mengerti tentang Konsep dan Tata Cara Modernisasi Irigasi Jatiluhur.
7. Pelatihan peningkatan kompetensi staf Operasi dan Pemeliharaan (tingkat pemula, madya, dan utama). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah tersedianya staf Operasi dan Pemeliharaan (pemula, madya, dan utama).
8. Pelatihan harmonisasi pengelolaan irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan bersama Satker Perencanaan BBWS Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah tersedianya personil yang mengerti tentang harmonisasi pengelolaan sistem irigasi Jatiluhur.
9. Pelatihan staf operasional Unit Pengeloa Irigasi Modern (UPIM). Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya staf operasional Unit Pengeloa Irigasi Modern (UPIM).
10. Pelatihan anggota Komisi Irigasi tentang modernisasi irigasi. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anggota sekretariat Komisi Irigasi tentang modernisasi irigasi.

B. Pusat Pengembangan Karir

Kegiatan pengembangan karir mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Studi pengembangan karir staf Operasi dan Pemeliharaan. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan bersama Satker

Perencanaan BBWS Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan kajian pengembangan karir staf operasi dan pemeliharaan sistem irigasi Jatiluhur.

2. Pengaturan dasar hukum pengembangan karir petugas operasi dan pemeliharaan. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan bersama Satker Perencanaan BBWS Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil pengaturan dasar hukum pengembangan karir petugas operasi dan pemeliharaan sistim irigasi Jatiluhur.
3. Pilot implementasi pengembangan karir petugas operasi dan pemeliharaan. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan bersama Satker Perencanaan BBWS Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan pilot implementasi pengembangan karir petugas operasi dan pemeliharaan sistim irigasi Jatiluhur.
4. Pengaturan standar kompetensi petugas op (dasar, menengah, ahli). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan bersama Satker Perencanaan BBWS Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen standar kompetensi petugas operasi dan pemeliharaan sistim irigasi Jatiluhur baik untuk pemula, madya, dan utama.
5. Sertifikasi petugas Operasi dan Pemeliharaan. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan bersama Satker Perencanaan BBWS Citarum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya petugas operasi dan pemeliharaan sistim irigasi Jatiluhur yang memiliki sertifikat keahlian.
6. Pelatihan/Lokakarya tentang "Koordinasi Perencanaan PPSIP" DI Jatiluhur. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan pelatihan/lokakarya tentang "Koordinasi Perencanaan PPSIP" DI Jatiluhur.
7. Pelatihan/Lokakarya peningkatan kapasitas bagi Sekretariat dan Anggota Komir Provinsi dan Komir Kabupaten. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran yang diharapkan adalah

adanya dokumen laporan kegiatan pelatihan/lokakarya peningkatan kapasitas bagi Sekretariat dan Anggota Komir Provinsi dan Komir Kabupaten.

8. Fungsionalisasi Komir melalui rapat penyusunan program dan kegiatan PPSIP periode 5 tahun dan 1 tahun. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran yang diharapkan adalah adanya dokumen laporan kegiatan pertemuan fungsionalisasi Komir melalui rapat penyusunan program dan kegiatan PPSIP periode 5 tahun dan 1 tahun.
9. Pelatihan bagi Tim Pendamping Masyarakat (TPM). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan Tim Pendamping Masyarakat (TPM).
10. Pelatihan dan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan dan Lingkungan (PSETKL) dengan metoda Pemahaman Partisipatif Kondisi Daerah Irigasi (PPKDI). Pelaksana kegiatannya adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluaran yang diharapkan adalah adanya dokumen laporan kegiatan pelatihan dan penyusunan PSETKL dengan metoda PPKDI.
11. Pelatihan Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Irigasi untuk staf BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi, dan PJT II. Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan staf BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi, dan PJT II dalam pengawasan pengelolaan irigasi..
12. Pembentukan Unit Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam B/BWS. Pelaksana kegiatannya adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya terbentuknya Unit Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A di BBWS Citarum.
13. Pelatihan untuk Pelatih Modernisasi Irigasi. Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa bersama NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya instruktur untuk pelatihan modernisasi irigasi pada sistim irigasi Jatiluhur.
14. Pelatihan modernisasi untuk staf BBWS Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dan PJT II. Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa Direktorat Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan staf BBWS Citarum, Dinas Provinsi Jawa Barat dan PJT II dalam modernisasi irigasi Jatiluhur.

15. Pelatihan pengelolaan irigasi modern untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan DI Jatiluhur. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan petugas Operasi dan Pemeliharaan DI Jatiluhur untuk mengelola irigasi modern..

C. Peningkatan Kapasitas KPI Dalam Kerangka Pengelolaan Aset

Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam kerangka pengelolaan asset diwujudkan melalui kegiatan pelatihan pengelolaan asset irigasi bagi staf balai (BBWS Citarum). Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan staf BBWS Citarum dalam pengelolaan aset irigasi..

D. Peningkatan Kapasitas KPI Dalam Kerangka SCADA

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam kerangka SCADA diwujudkan melalui kegiatan pelatihan untuk tenaga pelatih terkait Sistim Irigasi Cerdas (*Smart IrrigationSystem)*. Pelaksana kegiatan ini adalah CPIU Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah tersedianya tenaga pelatih untuk pelatihan Sistim Irigasi Cerdas (*Smart IrrigationSystem)*.

E. Peningkatan Kapasitas KPI Dalam Kerangka Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (PROM)

Kegiatan ini meliputi :

1. Pelatihan Intensif untuk Staf Operational dan Pemeliharaan. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan staf Operational dan Pemeliharaan BBWS Citarum yang siap melaksanakan OP DI Jatiluhur.
2. Pelatihan Intensif untuk Tenaga Pelaksana Teknis/Juru Pengairan. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalahmeningkatnya kemampuan Tenaga Pelaksana Teknis/Juru Pengairan pada sistim irigasi Jatiluhur.

F. Puslitbang Sumber Daya Air / Balai Irigasi

Kegiatannya meliputi :

1. Penguatan Program Dalam Konteks Modernisasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan penguatan program dalam konteks modernisasi irigasi pada sistem irigasi Jatiluhur.
2. Desiminasi Program dalam konteks modernisasi irigasi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan diseminasi program modernisasi irigasi pada sistem irigasi Jatiluhur.

2.2.2.3 Pengembangan Kapasitas Petani Pemakai Air Irigasi

Kegiatan pengembangan kapasitas petani pemakai air irigasi mencakup 2 (dua) kegiatan utama, yaitu: (a) Pengembangan Kapasitas; dan (b) Keberlanjutan Pengembangan dan Peningkatan Petani Pemakai Air.

Rincian masing-masing kegiatan diatas dijelaskan sebagai berikut :

A. Pengembangan Kapasitas, meliputi :

1. Studi pengembangan kapasitas P3A dalam pengelolaan air. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU OP-PSDA pada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan kajian pengembangan kapasitas P3A dalam pengelolaan air.
2. Pelatihan implementasi pola tanam. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan pelatihan pelaksanaan pola tanam. (harus disesuaikan dengan POM Buku 6)
3. Pelatihan alternatif tanaman bernilai tinggi. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan pelatihan alternatif tanaman bernilai tinggi. (harus disesuaikan dengan POM Buku 6)

4. Pelatihan penguatan institusi P3A/GP3A/IP3A termasuk pengelolaan finansial. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah adanya meningkatnya kemampuan P3A/GP3A/IP3A termasuk kemampuan pengelolaan finansial.
5. Pelatihan implementasi pengelolaan irigasi partisipatif untuk P3A/GP3A/IP3A. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah meningkatnya kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi partisipatif.

B. Keberlanjutan Pengembangan dan Peningkatan Petani Pemakai Air.

Kegiatan ini meliputi :

1. Pengadaan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM) . Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah tersedianya KTPM pada sistim irigasi Jatiluhur.
2. Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) . Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah tersedianya TPM untuk kegiatan pendampingan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) pada sistim irigasi Jatiluhur.
3. Implementasi penyuluhan P3A/GP3A tentang pengelolaan air. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan pelaksanaan penyuluhan P3A/GP3A tentang pengelolaan air.
4. Program studi banding petani ke provinsi/kabupaten lain di Indonesia dalam pengelolaan air dan pendapatan petani. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan studi banding petani ke provinsi/kabupaten lain di Indonesia dalam pengelolaan air dan pendapatan petani. (harus sesuai dengan POM Buku 6)
5. Kampanye perekrutan petani muda. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan kampanye rekruitmen petani muda pada sistim irigasi Jatiluhur. (harus sesuai dengan POM Buku 6)
6. Pengembangan manfaat irigasi untuk kegiatan ekonomi lainnya. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan pengembangan manfaat irigasi untuk kegiatan ekonomi lainnya pada sistim irigasi Jatiluhur.

7. Kampanye keberlanjutan lahan sawah. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan kampanye keberlanjutan pertanian di lahan sawah beririgasi pada sistem irigasi Jatiluhur. (harus sesuai dengan POM Buku 6)
8. Pengembangan Forum Petani Irigasi Muda. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan pengembangan Forum Petani Irigasi Muda pada sistim irigasi Jatiluhur.
9. Kampanye penggunaan Sistem Informasi Pengembangan Forum Petani Muda ~~Irigasi~~. Pelaksana kegiatan ini adalah BBWS Citarum. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan kampanye penggunaan Sistem Informasi Pengembangan Forum Petani Muda ~~Irigasi~~ pada sistim irigasi Jatiluhur.

2.2.2.4 Pelatihan Lingkungan dan Gender

Pelatihan lingkungan dan jender dalam kegiatan SIMURP mencakup 2 (dua) kegiatan utama, yaitu: (a) Perspektif Gender; dan (b) Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.

Rincian masing-masing kegiatan diatas dijelaskan sebagai berikut :

A. Perspektif Gender

Rincian kegiatan perspektif jender meliputi:

1. Pelatihan perspektif gender dalam PPSIP dan peningkatan kapasitas perempuan. Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan kegiatan pelatihan perspektif gender dalam PPSIP dan peningkatan kapasitas perempuan pada sistim irigasi Jatiluhur.
2. Fasilitasi peralatan pengolahan industri rumah tangga hasil pertanian. NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian. Keluarannya adalah adanya dokumen laporan hasil kegiatan fasilitasi peralatan pengolahan industri rumah tangga hasil pertanian pada sistim irigasi Jatiluhur. (harus sesuai dengan POM Buku 6)

B. Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Rincian kegiatan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaksana kegiatannya adalah CPIU Irwa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan kegiatan pelatihan perlindungan lingkungan dan sosial pada sistim irigasi Jatiluhur. (Pelatihan ini untuk siapa dan harus sesuai dengan POM Buku 3)
2. Pelatihan monitoring pengelolaan lingkungan dan sosial. Keluaran kegiatan ini adalah adanya dokumen laporan kegiatan pelatihan monitoring pengelolaan lingkungan dan sosial pada sistim irigasi Jatiluhur. (Pelatihan ini untuk siapa dan harus sesuai dengan POM Buku 3)

BAB III
INDIKATOR TARGET PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Secara umum indicator target penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dalam program SIMURP dituangkan sebagai bagian dari *Project Development Objective* (PDO) yang tertuang dalam *Project Appraisal Document* (PAD) *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP), tanggal 31 Mei 2019. Uraian secara rinci terkait dengan target penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Manfaat Proyek

Penerima manfaat utama proyek *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* mencakup antara lain sebagai beikut:

(1) Rumah tangga petani yang secara langsung mendapatkan manfaat dari layanan (alokasi dan distribusi) air irigasi yang lebih andal, tahan iklim, dan efisien, peningkatan produktivitas pertanian melalui peningkatan pengelolaan air irigasi dan intervensi pertanian cerdas iklim. Rumah tangga petani pemanfaat proyek tersebut meliputi 300.000 rumah tangga petani pada areal seluas 100.000 ha dalam sistim irigasi Pusat (Komponen A), dan 587.000 rumah tangga petani pada areal seluas 176.000 ha dalam sistim irigasi strategis nasional di Jatiluhur (Komponen B); dan

(2) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A), dan komisi irigasi.

3.2. Indikator Utama Proyek

Tujuan penyelenggaraan kegiatan SIMURP adalah untuk meningkatkan layanan sistim irigasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan sistim irigasi pada beberapa daerah irigasi terpilih. Tujuan tersebut dioperasionalkan melalui 2 (dua) indikator utama, yaitu (Lihat Tabel 3.1):

Tabel 3. 1 Indikator Utama Proyek SIMURP

Indikator Utama Dalam PDO	DLI	CRI	Unit Pengukuran	Garis Dasar	Target Akhir
Peningkatan Layanan Irigasi					
Area tersedia dengan layanan irigasi atau drainase baru/sudah ditingkatkan		Ya	Hektar (Ha)	0.00	276,000.00
Persentase intensitas tanaman (sawah)			Persentase	180.00	200.00
Penguatan akuntabilitas pengelolaan sistim irigasi					
Jumlah perjanjian layanan irigasi dengan alokasi anggaran dan pelaksanaan tanggung jawab yang jelas			Angka	0.00	9.00
Jumlah sistem pengelolaan aset dengan transparansi alokasi anggaran operasional			Angka	0.00	9.00

3.3. Indikator Hasil Pendukung Berdasarkan Komponen

3.3.1 Komponen A: Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak

Indikator pendukung pencapaian target proyek SIMURP berdasarkan komponen kegiatan A (Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak) yang berkaitan dengan kegiatan penguatan kelambagaan dan pengembangan sumberdaya manusia dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Indikator Pendukung Komponen A Proyek SIMURP

Indikator Pendukung Komponen A	DLI	CRI	Unit Pengukuran	Garis Dasar	Target Akhir
Komponen A: Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak					
Laporan Kinerja Tahunan Penyedia Layanan Irigasi yang dipublikasikan (Komponen A)			Angka	0.00	8.00
Komisi Irigasi (KOMIR) yang dibentuk dan beroperasional (Komponen A)			Angka	8.00	20.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) terintegrasi dalam dokumen perencanaan (Komponen A)			Angka	9.00	20.00

Indikator Pendukung Komponen A	DLI	CRI	Unit Pengukuran	Garis Dasar	Target Akhir
Komponen A: Rehabilitasi Sistem Irigasi dan Drainase Mendesak					
P3A dan anggotanya terlatih dalam proses pengambilan keputusan (Komponen A)			Angka	0.00	270.00
P3A dan anggota wanita tani yang terlatih dalam proses pengambilan keputusan (Komponen A)			Persentase	0.00	50.00
Jumlah P3A yang dibentuk dan beroperasional (Komponen A)			Angka	0.00	90.00
Pembentukan dan operasionalisasi mekanisme pengaduan untuk pemanfaat air dalam layanan irigasi (Komponen A)			Angka	0.00	6.00
Jumlah rumah tangga petani yang mendapat manfaat peningkatan layanan irigasi (Komponen A)			Angka (Ribuan)	0.00	300.00

3.3.2 Komponen B: Modernisasi Sistim Irigasi dan Drainase Strategis

Indikator pendukung pencapaian target proyek SIMURP berdasarkan komponen kegiatan B (Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis) yang berkaitan dengan kegiatan penguatan kelambagaan dan pengembangan sumberdaya manusiadapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Indikator Pendukung Komponen B Proyek SIMURP

Indikator Pendukung Komponen B	DLI	CRI	Unit Pengukuran	Garis Dasar	Target Akhir
Komponen B: Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis					
Laporan kinerja tahunan penyedia layanan irigasi yang dipublikasikan (Komponen B)			Angka	0.00	1.00
Komisi Irigasi (KOMIR) yang dibentuk dan beroperasional (Komponen B)			Angka	1.00	4.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) terintegrasi dalam dokumen perencanaan (Komponen B)			Angka	1.00	4.00
P3A dan anggotanya terlatih dalam proses pengambilan keputusan (Komponen B)			Angka	0.00	480.00

Indikator Pendukung Komponen B	DLI	CRI	Unit Pengukuran	Garis Dasar	Target Akhir
Komponen B: Modernisasi Sistem Irigasi dan Drainase Strategis					
P3A dan anggota wanita tani yang terlatih dalam proses pengambilan keputusan (Komponen B)			Persentase	0.00	50.00
Jumlah P3A yang dibentuk dan beroperasional (Komponen B)			Angka	0.00	160.00
Pembentukan dan operasionalisasi mekanisme pengaduan untuk pemanfaat air dalam layanan irigasi (Komponen B)			Angka	0.00	9.00
Jumlah rumah tangga petani yang mendapat manfaat peningkatan layanan irigasi (Komponen B)			Angka (Ribuan)	0.00	587.00

BAB IV
RENCANA ANGGARAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BERDASARKAN KOMPONEN KEGIATAN

Sumber pembiayaan kegiatan SIMURP berasal dari pinjaman luar negeri (*Loan* AIIB L0060A dan *Loan* IBRD LN 8891-ID) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Indonesia. Alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan SIMURP mencakup 3 komponen seluruhnya mencapai sebesar 578US$ yang terdiri dari pinjaman Bank Dunia sebesar 250 US$, pinjaman AIIB sebesar 250 US$, dan bersumber APBN sebesar 78 US$ (**Tabel 4.1** dan **Tabel 4.2**).

Tabel 4. 1 Alokasi Anggaran Kegiatan SIMURP
Berdasarkan Komponen Kegiatan

Komponen Kegiatan	Total Biaya (USD$)	Pembiayaan (US$)		
		IBRD	AIIB	APBN
Komponen A	225.4	98.6	98.6	28.2
Komponen B	333.6	143.0	143.0	47.6
Komponen C	19.0	8.4	8.4	2.2
Biaya Total	**278.0**	**250.0**	**250.0**	**78.0**

Tabel 4. 2 Alokasi Anggaran Kegiatan SIMURP Berdasarkan Institusi

(US$)

Institution	WB		AIIB		GOI		Tax		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%	Amount	%
1 Bina Bangda	4.732.030,37	2	4.732.030	45,45	-	-	946.406	9,09	10.410.467	1,8
2 Pertanian	6.648.452,22	3	6.648.452	45,45	-	-	1.329.690	9,09	14.626.595	2,5
3 Bina OP	3.786.560,56	2	3.786.561	45,45	-	-	757.312	9,09	8.330.433	1,4
4 Irigasi dan Rawa	13.300.163,52	5	13.300.164	45,45	-	-	2.660.033	9,09	29.260.360	5,1
5 B/BBWS	218.551.785,92	90	218.551.786	42,95	25.454.545	5,00	46.255.812	9,09	508.813.929	88,0
6 Bappenas	1.657.407,41	1	1.657.407	45,45	-	-	331.481	9,09	3.646.296	0,6
7 PJSDA	1.435.185,19	1	1.435.185	45,45	-	-	287.037	9,09	3.157.407	0,5
Total PROJECT COSTS	**250.111.585**	**43,3**	**250.111.585**	**43,3**	**25.454.545**	**4,4**	**52.567.772**	**9,09**	**578.245.487**	**100**

Penjelasan alokasi anggaran untuk kegiatan penguatan kelembagaan berdasarkan setiap komoponen kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

4.1. Anggaran Kegiatan Komponen A: Rehabilitasi Sistim Irigasi dan Drainase Mendesak

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sistim irigasi dan drainase mendesak tersebar di 9 B/BWS, 8 provinsi, dan 17 kabupaten tersebut membutuhkan anggaran seluruhnya sebesar US$225,4 Million atau setara dengan nilai kurs (1$ = 13.912) sebesar Rp 3.135.764.800.000,00. Berdasarkan jumlah tersebut, maka alokasi anggaran untuk kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi (subkomponen A.3) dan pengembangan sumberdaya manusia (subkomponen A.4) masing-masing sebesar US$1.2 Million dan US$5.4 Million. Nilai alokasi anggaran tersebut setara dengan nilai kurs yang sama adalah sebesar Rp 16.694.400.000 (subkomponen A3) dan sebesar Rp 75.124.800.00,00. Dengan demikian nilai alokasi untuk kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengembangan sumberdaya manusia pada komponen A seluruhnya sebesar US$ 6.6 Million atau setara dengan nilai urs yang sama sebesar Rp 91.819.200.00,00, yang dialokasikan untuk CPIU Irwa, NPIU OP-PSDA Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, NPIU Bangda Kementerian Dalam Negeri, NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian, dan PIU 9 Balai (B/BWS) lokasi SIMURP.

4.2. Anggaran Kegiatan Komponen B: Modernisasi Sistim Irigasi dan Drainase Strategis

Pelaksanaan kegiatan modernisasi sistim irigasi dan drainase strategis dilaksanakan pada sistim irigasi Jatiluhur (BBWS Citarum), provinsi Jwa Barat, dan 3 kabupaten (Subang, Karawang, dan Indramayu). Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut seluruhnya sebesar US$333,6 Million atau setara dengan nilai kurs (1$ = 13.912) sebesar Rp 4.641.043.200.000,00. Berdasarkan jumlah tersebut, maka alokasi anggaran untuk kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi (subkomponen B.3) dan pengembangan sumberdaya manusia (subkomponen B.4) masing-masing sebesar US$2.8 Million dan US$3.9 Million. Nilai alokasi anggaran tersebut setara dengan nilai kurs yang sama adalah sebesar Rp 38.953.600.000 (subkomponen A3) dan sebesar Rp 54.256.800.00,00. Dengan demikian nilai alokasi untuk kegiatan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengembangan sumberdaya manusia pada komponen B seluruhnya sebesar US$ 6.7 Million atau setara dengan nilai urs yang sama sebesar Rp 93.210.400.00,00, yang dialokasikan untuk CPIU Irwa, NPIU OP-PSDA Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, NPIU Bangda Kementerian Dalam Negeri, NPIU BPPSDMP Kementerian Pertanian, dan PIU BBWS Citarum lokasi SIMURP.